



## PROFIL

# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA



Jalan Surapati No. 1 – Kompleks Civic Center, Negara  
Telp. (0365) 41210 – Fax (0365) 41010



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Penyusunan buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025 ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi di dalam membuat perencanaan, tersedianya data yang valid yang dapat diakses dan memudahkan dalam menetapkan arah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Buku profil ini tidak hanya menyajikan data dan keadaan umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetapi juga memberikan informasi keberhasilan pembangunan dan pencapaian program sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami menyadari buku profil ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami memohon masukan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku ini dan keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Negara, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Jembrana

**Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196609191990102001



## **VISI MISI**

### **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

#### ***VISI :***

Visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026 yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”***.

#### ***Misi :***

1. Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)
3. Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi)
4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi)
5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)
6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)



---

**DAFTAR ISI**

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana.....	iii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Tujuan dan Manfaat	4	
BAB II Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....		5
2.1 Kelembagaan Dinas PPPA-PPKB	5	
- Bagan Struktur Organisasi	15	
2.2 Sumber Daya	16	
2.3 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.....	17	
BAB III VISI, MISI TUJUAN dan SASARAN.....		18
3.1 Visi	18	
3.2 Misi	18	
3.3 Tujuan.....	19	
3.4 Sasaran	22	
BAB IV Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....		23
4.1 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	23	
4.2 Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan.....	41	
4.3 Bidang Ketahanan, Kualitas Keluarga, dan Pengendalian Penduduk.....	60	
BAB V		
PENUTUP.....	91	

---





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya program Pemberdayaan Perempuan dan penanganan masalah Gender telah dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari pendekatan Women In Development (WID), kemudian Women and development (WAD), dan sampai pada pendekatan Gender And Development (GAD) yang dilengkapi dengan strategi pengurusanutamaan Gender (Gender Mainstreaming). Namun demikian sampai saat ini isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan masih perlu mendapat tanggapan serius dari semua pihak karena visi untuk mewujudkan komitmen dan keadilan yang belum optimal.

Untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut tentu bukan merupakan perkara mudah. Di Kabupaten Jembrana, pemerintah berupaya untuk membuat program pembangunan guna menekan ketimpangan Gender yang masih terjadi di berbagai bidang pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial budaya. Untuk mencapai hasil yang maksimal komitmen pemerintah tersebut tentu harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam kehidupan masyarakat

Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No : 9 Tahun 2000 tentang : pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Melalui Instrument Yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua Pejabat Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan



pengarusutamaan Gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional yang perspektif Gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian Gender dalam kebijakan, program atau sering disebut kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi Data Gender yang ada.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau sering disebut data Gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan / program / kegiatan pembangun, untuk tahun anggaran 2025, kabupaten Jembrana sudah mempunyai data terpilah/buku gender dengan harapan permasalahan-permasalahan gender akan dapat ditangani secara cepat dan efektif dengan berbagai lintas sektor terkait. Pemerintah kabupaten Jembrana berupaya untuk dapat mengoptimalkan kesetaraan gender melalui perencanaan perspektif Gender sehingga kegiatan-kegiatan terimplementasi secara nyata melalui program sinergitas lintas sektor.

Untuk program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Jembrana tahun 2025 yang dilaksanakan selama ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang diawali dengan sebuah perencanaan atau berencana dengan berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk. Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan, kesehatan, agama, kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga dan lain-lain, sedangkan upaya pengendalian kuantitas penduduk meliputi keadaan jumlah, struktur, kepadatan dan pertumbuhan penduduk dilaksanakan



---

melalui mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
3. Instruksi presiden No : 5 tahun 1995 tentang Peningkatan peranan wanita dalam Pembangunan di daerah.
4. Instruksi menteri dalam negeri Nomor : 29 Tahun 1998 Tentang Petunjuk pelaksanaan pembangunan peranan wanita di Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang : Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2011 Tentang : Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah
6. Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 20 Tahun 2023, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana



9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
11. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak.
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender.

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yaitu sebagai media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel untuk penyusunan program dan pengambilan kebijakan berdasarkan pada pendekatan perencanaan strategis, manajemen strategis dan evaluasi strategis dalam pengelolaan seluruh potensi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Adapun manfaat dari penyusunan Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah :

1. Sumber informasi yang memuat tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
2. Tersedianya data yang valid sebagai acuan dalam membuat perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat pada tahun - tahun mendatang.
3. Memudahkan dalam penetapan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.



## BAB II

### STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### 2.1 KELEMBAGAAN DINAS PPPA-PPKB

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari :

##### **A. Tugas**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanadan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

##### **C. Rincian Tugas**

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;



- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui sistem pengendalian internal (SPI) agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; memberikan rekomendasi, saran, dan pertimbangan terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;



- i. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
- j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemeringah;
- n. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);menilai prestasi kerja bawahan;
- o. menilai prestasi kerja bawahan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Dinas;





- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Bidang;
- j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);



- q. menilai prestasi kerja bawahan;
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;
  - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Dinas, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas;
  - d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Dinas;
  - e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
  - f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Dinas;
  - g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
  - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Dinas;
  - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - j. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
  - k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Dinas;
  - l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai;
  - m. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana



- Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;
  - p. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;
  - r. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
  - s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;
  - t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - u. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
  - v. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
  - w. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - x. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
  - y. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
  - z. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
  - aa. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
  - cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan



dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan Penggerakan.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana, penyuluhan, dan penggerakan berdasarkan rencana strategis Dinas;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. menyusun rencana, program dan anggaran di bidang keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- f. melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- g. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- i. melaksanakan administrasi keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan;
- j. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan keluarga berencana, penyuluhan, dan penggerakan;
- k. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;



- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5. Kepala Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk Kepala Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas;
  - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana di perjanjikan;
  - d. menyusun rencana, program dan anggaran di bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - f. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - g. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - i. melaksanakan administrasi bidang ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
  - j. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan ketahanan, kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;



- k. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
  - l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas;
  - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
  - d. menyusun rencana, program dan anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. memberi bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

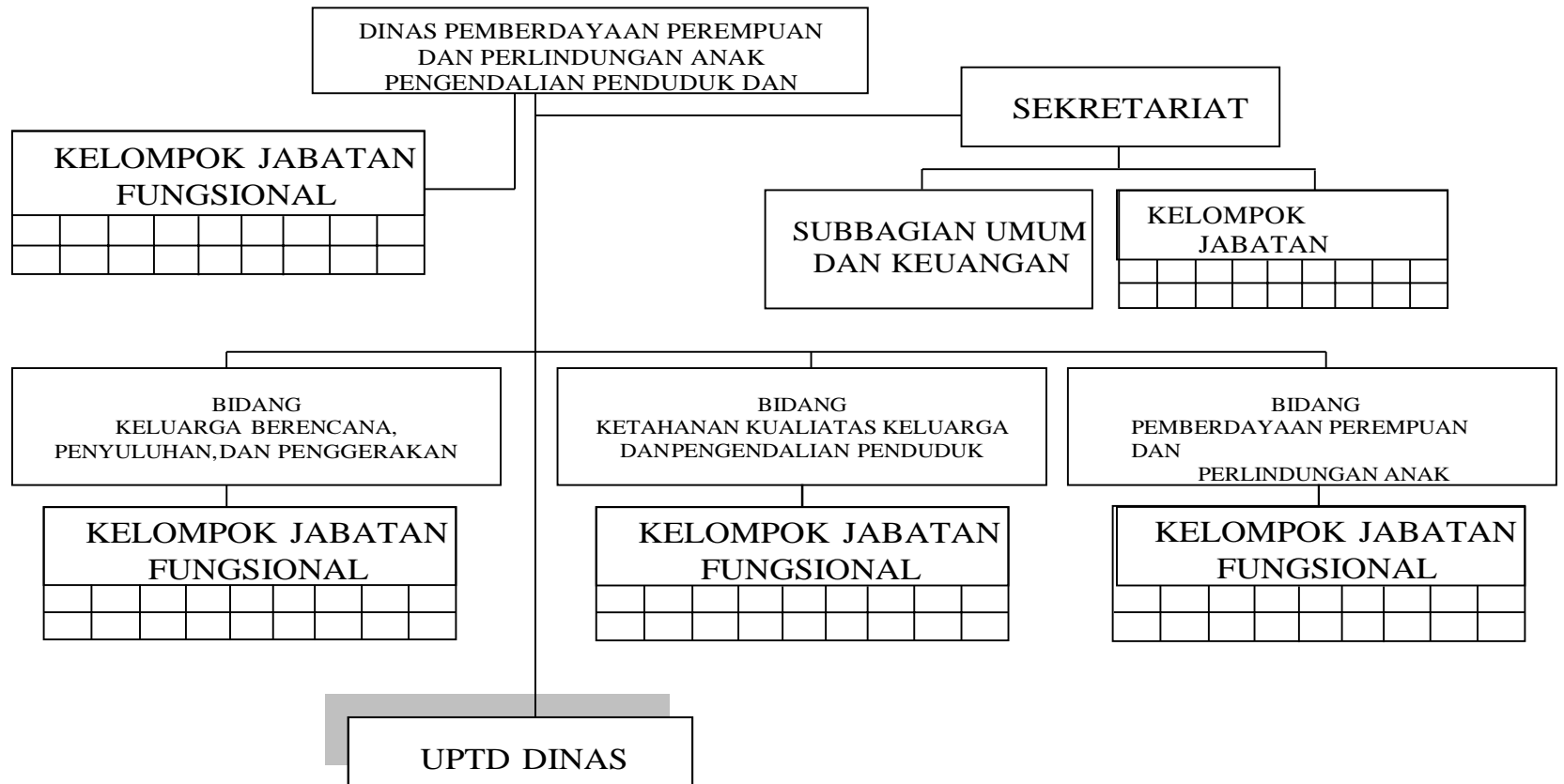


- j. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan





### Struktur organisasi



## 2.2 SUMBER DAYA

**2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA** Sampai dengan saat ini jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berjumlah 63 (Enam Puluh Tiga) orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, golongan dan jenis kelamin, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
Dinas PPPAPPKB Kab Jember  
Tahun 2025

<b>Magister (S2)</b>	<b>Sarjana (S1)</b>	<b>Diploma</b>	<b>SMA/SMK</b>	<b>SMP</b>	<b>SD</b>	<b>TOTAL</b>
7	10 (PNS) 6 ( P3K ) 4 (Non ASN)	1 (PNS) 1 ( P3K ) 0 (Non ASN)	2 (PNS) 12 (P3K) 5(Non ASN )	-	-	48

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas PPPAPPKB Kab Jember  
Tahun 2025

<b>Golongan</b>	<b>IV c</b>	<b>IV b</b>	<b>IV a</b>	<b>III d</b>	<b>III c</b>	<b>III b</b>	<b>III a</b>	<b>IX</b>	<b>VII</b>	<b>V</b>	<b>II d</b>	<b>II c</b>	<b>II b</b>	<b>II a</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	1	1	3	7	2	3	2	6	1	12	1	-	-	-	39

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas PPPAPPKB Kab Jember  
Tahun 2025

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	4 (PNS) 6 ( P3K ) 5 (Non ASN)	16 (PNS) 13 ( P3K ) 4 (Non ASN)	48

### 2.3. ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana memiliki aset, kewajiban dan ekuitas yang tercatat pada Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.455.634.584,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

#### **NERACA PPPAPPKB Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>ASET</b>	
ASET LANCAR	
Aset Lancar	
Persediaan	646.802.789,00
JUMLAH ASET LANCAR	646.802.789,00
ASET TETAP	
Tanah	317.700.000,00
Peralatan dan Mesin	5.460.811.206,00
Gedung dan Bangunan	1.381.863.000,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	(5.351.542.411,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.808.831.795,00
ASET LAINNYA	
Aset Lainnya	
Akumulasi penyusutan Aset Lainnya	
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.455.634.584,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Belanja	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	798.895,00
JUMLAH KEWAJIBAN	<b>798.895,00</b>
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas	2.454.835.689,00
JUMLAH EKUITAS	2.454.835.689,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.455.634.584,00</b>

## BAB III

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 VISI

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan: "VISI Adalah Cara Pandang Jauh Ke Depan Kemana Instansi Pemerintah Harus Dibawa Agar Tetap Eksis, Antisipatif, Dan Inovatif". (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

#### 3.2 MISI

Perumusan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomer 20 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Terpilih , Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2021-2026 dengan Tema : **"Mewujudkan Jembrana Emas Tahun 2026"** , maka ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah :  
Visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026 yaitu ***"Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana"***.

Dengan Misi :

1. Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)
3. Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi)
4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi)
5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)
6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)

Mencermati Visi Misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana melaksanakan Misi yang ke 6 Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi).

### **3.3 TUJUAN**

#### **TUJUAN/SASARAN**

Tujuan/sasaran yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesetaraan gender.  
*Indikator* : Indek Pembangunan Gender
- b. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan  
*Indikator* : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta
- c. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak  
*Indikator* : Kategori Kabupaten Layak Anak
- d. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)  
*Indikator* : Rata-rata anak per wanita
- e. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mcpr/modern contraceptive prevalence rate)  
*Indikator* : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mcpr/modern contraceptive prevalence rate) wanita

- f. Menurunnya persentase kebutuhan ber kb yang tidak terpenuhi (unimeet need)  
*Indikator* : Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
- g. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel  
*Indikator* : predikat nilai sakin, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

### **3.3.1 KEBIJAKAN :**

Kebijakan merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam lima tahun antara lain :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Menyusun program dan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuju keluarga sejahtera.

Penetapan tujuan umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan Faktor - Faktor Kunci/Penentu Keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT dan SWOT. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Meningkatkan Keluarga Berkualitas dan Pengendalian Penduduk.

Indikator Tujuan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Tujuan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
1	Meningkatkan kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks pembanguna Gender
2	Meningkatkan Keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk	1. Persentase penurunnya laju Pertumbuhan Penduduk 2. Persentase Peningkatan kelompok peduli KB

Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran berikut diuraikan keterkaitan antara tujuan prioritas dan sasaran stategis sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN PRIORITAS</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas administrasi kependudukan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB

Keterkaitan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2021-2026 yaitu pada Misi Pertama dan Tujuan Lima Prioritas seperti tabel berikut :



**Tabel 3.3**  
**Misi dan Tujuan Prioritas**

NO	TUJUAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul	Meningkatnya cakupan layanan Pemberdayaan Perempuan, KB, tenaga kerja, Transmigrasi. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 3.4 SASARAN

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kepesertaan ber Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya partisipasi kelompok peduli Keluarga Berencana.

Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *input*, *output* ataupun *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk dapat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

**BAB IV**  
**LAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**  
**JEMBRANA**

**4.1 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**4.1.1. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

Dalam pelaksanaan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk pengukuran prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama dapat kami laporkan sebagai berikut:

**4.1.1.1. Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indikator persentase indeks pembangunan gender (IPG) dengan mekaskanakan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan untuk menentukan dari persentase indeks pembangunan gender (IPG) sumber datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,43	94,52	94,90	Data baru rilis dari BPS per Maret 2026

Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada label berikut:

**Tabel**  
**Realisasi IKU dengan perbandingan Capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	74	94,52	127,72	74	94,90	128,24	74		

Pencapaian rencana target indikator kinerja utama sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa persentase indeks pembangunan gender (IPG) sesuai dengan perjanjian kinerja pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 74% terealisasi . sehingga dapat dikatakan telah menapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan dukungan sumber daya baik sarana maupun prasarana seta koordinasi dengan lintas sector yang sudah optimal.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026 kinerja yang tercapai sebesar 125,146% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2026 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2025	
Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	74		99.32	75		98

Adapun program dalam pencapaian target indikator indeks pembangunan gender (IPG) adalah sebagai berikut:

### **1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota termasuk PPRG, dengan indikator pencapaian target kinerja Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota dimana dari 215 Orang peserta advokasi dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan kesetaraan gender direncanakan pada tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.880.000 atau terealisasi 98,80%.
- b. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator pencapaian target kinerja adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan. Dimana dari 5 Lembaga yang direncanakan mendapatkan Advokasi dan Pendampingan pada tahun 2025, sudah terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp41.400.000 dan terealisasi sebesar Rp41.400.000 atau terealisasi 100%.
- c. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator pencapaian target kinerja adalah Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Dimana dari 500 Orang yang direncanakan mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada tahun 2025,

sudah terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp163.218.000 dan terealisasi sebesar Rp 133.321.009 atau terealisasi 81,68%.

## **2. Program Perlindungan Perempuan**

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian target kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana dari 5 dokumen yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.750.000 dan terealisasi sebesar Rp50.374.200 atau terealisasi 99,26%.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian target kinerja adalah Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana dari 19 layanan yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 115.070.000, dan terealisasi sebesar Rp. 35.008.705 atau terealisasi 31,46%.
- b. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, dimana dari 5 Orang yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar

100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp37.120.000 , dan terealisasi sebesar Rp34.620.039 atau terealisasi 93,27%.

#### 4.1.1.2 Peningkatan Capaian Kabupaten Layak Anak

Indikator capaian Kabupaten Layak Anak dengan melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan program Perlindungan Khusus Anak. Untuk menentukan capaian Kabupaten layak anak didasarkan pada penghargaan pusat.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Peningkatan Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	Nindya	Pengumuman resmi dari Kemen PPA untuk KLA tahun 2025 baru keluar bulan Oktober 2026

Capaian indikator kinerja dari IKU dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

#### Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan Capaian Kabupaten Layak Anak	%	100	100	100	100	100	100	100		

Pencapaian rencana target indikator kinerja utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa peningkatan capaian kabupaten layak anak sesuai dengan perjanjian kinerja pada tahun 2025, yang ditargetkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026 kinerja yang tercapai sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

#### Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Peningkatan	%	100	100	100	100		

Capaian Kabupaten Layak Anak							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Adapun program dalam pencapaian target indikator partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut diatas:

### **1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

- a. Kegiatan Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dimana dari 45 Dokumen yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp12.490.000 , dan terealisasi sebesar Rp12.009.000 atau terealisasi 96,15%.

### **2. Program Perlindungan Khusus Anak**

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, dengan indikator Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, dimana dari 45 Orang yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.750.000 , dan terealisasi sebesar Rp 49.544.300 atau terealisasi 97,62%.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang



Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana dari 21 layanan yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 115.070.000, dan terealisasi sebesar Rp. 52.183.901 atau terealisasi 43,83%.

- d. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK, dimana dari 5 Orang yang direncanakan tahun 2025, terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp31.900.000 , dan terealisasi sebesar Rp31.558.467 atau terealisasi 98,93%.

#### **4.1.1.4. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan**

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jembrana untuk meminimalisasi terjadinya kasus KDRT, di Kabupaten Jembrana telah terbentuk tim Pencegahan dan Penanganan Kasus kekerasan (P2K2). Dan kami juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kasus kekerasan di Kabupaten Jembrana



Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jembrana yaitu Mobil Perlindungan (MOLIN) dan Motor Perlindungan (TORLIN) yang digunakan untuk memfasilitasi antar jemput korban kekerasan baik Anak maupun Perempuan.



MOLIN



TORLIN

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana bersama UPTD PPA yaitu

- Kegiatan layanan Penjangkauan dan Pendampingan kasus. Kegiatan Penjangkauan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat, rujukan dari instansi terkait, maupun hasil identifikasi lapangan. Selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap korban dengan konsultasi oleh psikolog dari UPTD Provinsi Bali yang tujuannya untuk Pemulihan trauma dan supaya korban mendapat suport dan motivasi dalam menjalani pemeriksaan sehingga tidak merasa sendiri.



- Dilaksanakan kunjungan rumah korban yang terjadi di Kabupaten Jember. Kunjungan rumah korban merupakan bagian dari layanan penjangkauan aktif yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam rangka memberikan perlindungan dan pendampingan langsung kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan rasa aman, dukungan pemulihan, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan secara tepat dan terpadu.



Dalam hal upaya pencegahan kekerasan terhadap anak maka di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan dengan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Jember, bersinergi dengan mengadakan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Sosialisasi dan kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang Pemenuhan Hak Anak serta Pentingnya Perlindungan terhadap Anak sehingga anak terhindar dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. FAD memiliki koordinator di masing-masing komisi yaitu Komisi Perlindungan Khusus, Pendidikan, Kesehatan, Jaringan dan Partisipasi yang sebelumnya terpilih dalam ajang Pemilihan Duta Anak yang terselenggara setiap tahunnya.





Selanjutnya selama setahun mereka bersama anggota FAD lainnya melaksanakan program kerja dengan sasaran anak-anak di Kabupaten Jembrana. Beberapa kegiatan FAD terangkum dalam dokumentasi berikut:





Adapun program kerja FAD Jembrana yang rutin melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana, yakni Program Jumat SEHATI ( Semangat Harmoni dan Edukatif ). Jumat SEHATI merupakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi, pembinaan, dan penguatan karakter kepada para siswa melalui berbagai materi yang disampaikan secara langsung dan interaktif.

Melalui Program Jumat SEHATI, peserta didik mendapatkan pemahaman mengenai nilai-nilai kedisiplinan, etika, kesehatan, keselamatan, serta wawasan kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara



pihak sekolah dengan instansi terkait dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan harmoni.



Dalam rangka menyambut Hari Anak yang jatuh pada 23 Juli setiap tahunnya, FAD melaksanakan Aksi Sambut Hari Anak (AKSARA) salah satunya dengan membuat kegiatan Aksi Sehat Tanpa Rokok (ASTRO) di 5 kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang merupakan program kerja dari komisi Kesehatan.

Selanjutnya, dari komisi Perlindungan Khusus, merancang sebuah program kerja yaitu SI PEKA yang merupakan akronim dari Sehari Bersama Perlindungan Khusus Gembira. Program kerja SI PEKA dilaksanakan dengan berkegiatan bersama anak-anak SLB di SLBN 1 Jembrana. Kegiatan di SLB ini meliputi senam bersama, sesi edukasi, mewarnai, pemberian hadiah, dan bermain di luar kelas.



Selain program kerja SI PEKA, komisi Perlindungan Khusus juga merancang program kerja yang bertajuk KATA (Karya Nyata Anak Untuk Sesama). KATA merupakan sebuah program dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun

2025 dengan aksi nyata berupa pemberian bantuan sosial dari hasil pengumpulan donasi kepada anak-anak penyandang disabilitas.



Program kerja selanjutnya yang dirancang oleh Komisi Perlindungan Khusus yakni MELTED (Mental Health Education), yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Program ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi terkait Kesehatan Mental Pada Anak, tak hanya pemaparan materi saja, berkolaborasi dengan Komisi Partisipasi yang merancang program SAHABAT (Saling Hadir dan Berbagi Cerita). Melalui kolaborasi ini, kami membuka ruang aman untuk para audiens sosialisasi dalam menceritakan keluh, kesah, dan cerita mereka yang perlu diungkapkan dengan cara menuliskan cerita mereka dalam sebuah kertas secara anonim. Lalu, akan dibahas dan diberikan solusi. Program ini tentu menjadi ruang aman bagi anak-anak di Jembrana, karena seluruh cerita yang diungkapkan bersifat anonim.







Selanjutnya, Program kerja dari Komisi Pendidikan yaitu melakukan kegiatan Bermain, Belajar dan Berkreasi (3 Ber) yang dilaksanakan di Ruang Bermain Ramah Anak Bahagia di Areal GKBK.

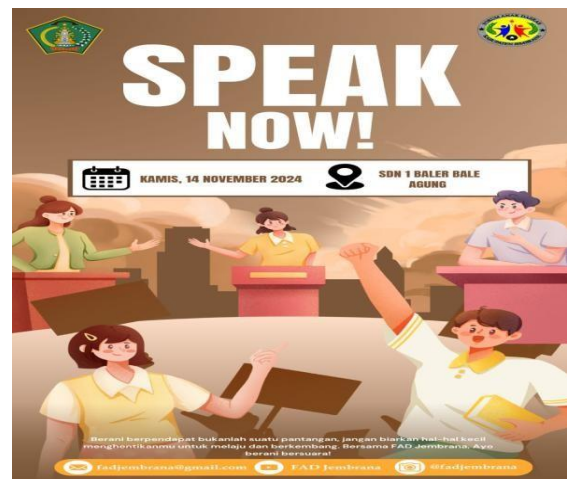


Selain 3-BER, komisi Pendidikan juga memiliki program yang bertajuk LAJ (Literasi Anak Jembrana). LAJ merupakan gerakan edukatif yang bertujuan menumbuhkan minat Literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas anak-anak di Kabupaten Jembrana sejak usia dini. Program ini dirancang sebagai ruang belajar yang menyenangkan, inklusif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga literasi tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan dan kebiasaan yang membangun.





Selanjutnya, program kerja dari komisi Partisipasi yaitu melaksanakan sosialisasi ke SD N 1 Baler Bale Agung yang berjudul SPEAK NOW yang mengajak siswa untuk lebih berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya baik ke orang tua, keluarga, pihak sekolah dan temen-teman.



Selain program kerja SPEAK NOW, komisi Partisipasi juga melaksanakan program kerja Donation for Do Nation dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Program ini merupakan program untuk mengumpulkan donasi dari berbagai pihak dalam bentuk barang yang bermanfaat untuk kebutuhan anak-anak di Jembrana, dan uang tunai. Berkolaborasi dengan program dari Komisi Perlindungan Khusus yang bertajuk KATA (Karya Nyata Anak Untuk Sesama), hasil donasi ini kemudian akan disalurkan kepada anak-anak disabilitas dalam bentuk alat tulis, sembako, dan pakaian yang masih layak pakai. Program ini tentu menjadi salah satu langkah nyata kecil yang efektif dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Jembrana.



Selanjutnya, program kerja dari Komisi Partisipasi yang bertajuk SAHABAT (Saling Hadir dan Berbagi Cerita). Program ini berkolaborasi bersama program dari Komisi Perlindungan Khusus yang bertajuk MELTED (Mental Health Education), rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan berkunjung ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana. Melalui program MELTED, dilaksanakan edukasi terkait Kesehatan Mental, lalu, melalui program SAHABAT disediakan ruang aman untuk para peserta dalam menceritakan segala keluhan, kesah, maupun perasaan mereka secara anonim melalui sebuah kertas. Segala cerita ini, kami bahas dan berikan solusi, sehingga ini menjadi satu langkah kecil dalam meminimalisasi terganggunya Kesehatan mental pada anak dan membantu mendorong anak agar tidak menyembunyikan segala kondisi emosional mereka yang seharusnya diungkapkan.





Selanjutnya, Komisi Jaringan juga memiliki program kerja berupa sosialisasi tentang pentingnya bermedia sosial yang bijak yang dikenal dengan istilah 3S yaitu Saring sebelum Sharing, dan kegiatan mereka bernama TRENDING yang dilaksanakan di SMPN 2 Negara. Tentu, program ini bertujuan untuk mengajak anak-anak di Jembrana agar bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan platform digital khususnya Media Sosial.



Selain program TRENDINGS, Komisi Jaringan juga merancang program kerja bertajuk SIMPATI (Saring Informasi, Manfaatkan Platform, Anti Toxic & Cyberbullying). SIMPATI adalah program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang pentingnya memilah informasi sebelum menyebarkannya (Saring Sebelum Sharing) serta bahaya cyberbullying. Program ini dilakukan melalui sosialisasi ke SMAN 1 Melaya pada saat kegiatan MPLS berlangsung.



#### 4.1.1.4 Pemberdayaan Perempuan



Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam pertemuan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Jembrana mengundang narasumber sosialisasi dengan tema “Perempuan Penggiat Daur Ulang Sampah Kabupaten Jembrana”



Hasil keterampilan Perempuan untuk menunjang perekonomian keluarga dalam mengolah botol, kardus, kertas, bekas pembungkus plastik dan lain-lainnya menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga



Memperingati Hari Ibu ke 97 dan HUT DWP Kab. Jembrana ke 26 diadakan kegiatan Lomba Tata Rias Wajah (Make up) dan Lomba Nasi Tumpeng bersama Ibu -Ibu dari Gabungan Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Jembrana







Kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam Pemilihan Duta Anak di Kabupaten Jember tahun 2025



Kegiatan Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jember bersama Forum Anak Daerah mengadakan kunjungan ke SLB N 1 Jember untuk memberikan penyuluhan terkait sekolah ramah anak kepada anak dan orang tua

## **4.2 BIDANG KELUARGA BERENCANA, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

### **4.2.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana**

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, yang terdiri dari 4 (Empat) Sub kegiatan yaitu :
  1. Advokasi Program Bangga Kencana oleh POKJA Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. Dengan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Jember diharapkan terwujudnya keselarasan kebijakan dan program antar sektor, koordinasi yang lebih kuat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih terarah sehingga dapat mempercepat penurunan angka stunting secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, Adapun beberapa kesepakatan dan capaian pelaksanaan hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- **Keselarasan Kebijakan dan Program**

Seluruh peserta rapat memiliki pemahaman yang sama terkait arah kebijakan, strategi, serta program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana. Program lintas sektor disepakati untuk dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana aksi daerah.

- **Penguatan Koordinasi dan Peran Lintas Sektor**

Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota TPPS, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, telah dipertegas. Terjalin komitmen bersama antara pemerintah daerah, puskesmas, camat, perbekel, lurah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan intervensi stunting.

- **Pemantauan dan Evaluasi Capaian**

Rapat membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayah. Berbagai capaian dan kendala di lapangan berhasil diidentifikasi, termasuk tantangan dalam pendataan sasaran, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, serta koordinasi lintas sektor.

- **Perumusan Tindak Lanjut**

Disepakati langkah-langkah strategis tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, termasuk penetapan prioritas intervensi pada wilayah dan kelompok sasaran berisiko tinggi stunting. Selain itu, dirumuskan upaya optimalisasi dukungan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

- **Penguatan Komitmen Bersama**

Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mendukung dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara konsisten dan terintegrasi. Komitmen ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif dan berdampak nyata.

Serapan anggaran pada sub Kegiatan ini adalah 97,21% dari Pagu anggaran sebesar 46.625.000,- dan realisasi sebesar 45.324.926,-.





a. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang adalah upaya penyebarluasan informasi program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana merupakan program dari Kementerian Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KKBP). Tujuan promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melakukan advokasi, Melakukan promosi, Melakukan KIE, Mensosialisasikan program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal, Menurunkan stunting. Dalam upaya optimalisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan kearifan budaya lokal, melalui Promosi program BANGGA KENCANA, akan dilaksanakan kegiatan Pementasan Seni dengan tema Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Sanggar Ghora Yowana Budaya dengan menampilkan pertunjukan Jegog, Joged serta Bondres Petruk, Blauk dan Liku dirangkaikan dengan HUT Kota Negara yang ke-130, HUT Provinsi Bali yang ke-67 dan HUT RI yang ke-80. Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 94,06% dari Pagu anggaran sebesar 95.600.000,- dan realisasi sebesar 89.922.892,-.





b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok). Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (coach) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat. Dalam kegiatan mini lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *Stunting* by name by adres, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko *Stunting* dalam percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya.

Mini lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 99,53% dari Pagu anggaran sebesar 161.250.000,- dan realisasi sebesar 161.499.650,-



c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana. Dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga

Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting diperlukan dukungan Operasional kegiatan :

- Penyuluhan Program Bangga Kencana Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak 0-24 bulan, 25 – 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku Keluarga dan masyarakat guna mewujudkan Keluarga yang berencana dan Keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan stunting.
- Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, kader IMP (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko stunting.

Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 82,75% dari Pagu anggaran sebesar 290.750.000,- dan realisasi sebesar 189.702.423,-.



2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga Adalah dengan maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan *Stunting* baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan setempat dan dapat dilakukan kunjungan langsung, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya. Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 100% dari Pagu anggaran sebesar 153.000.000,- dan realisasi sebesar 153.000.000,-
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 Sub Kegiatan diantaranya:
  - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Pelaksanaan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi mencakup kegiatan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD-KB kabupaten dan kota ke fasyankes dan TPMB setara fasyankes. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di fasyankes se-Kabupaten Jembrana (56 Fasyankes). Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 49,87% dari Pagu anggaran sebesar 42.480.000,- dan realisasi sebesar 21.182.754,-.

Untuk menjawab tantangan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi yang lambat, Kebutuhan alokon yang tidak berbasis data dan serta belum menganut kepemimpinan kinerja Digital. kami Dinas PPPA-PPKB melakukan Inovasi untuk memberikan Kepastian Distribusi Alkon yang Cepat dan tepat ( efektif dan efisien ). berbasis elektronik/digital. SIMOLEK (sistem informasi manajemen distribusi alat dan obat kontrasepsi berbasis elektronik).



Launching Aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Manajemen Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi Berbasis Elektronik). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi digital yang dirancang guna mempermudah proses pendataan, pengelolaan, serta distribusi Alkon secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan pelayanan publik dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Aplikasi SIMOLEK hadir sebagai inovasi dalam mempermudah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (Alkon) secara transparan, cepat, dan tepat.

Dengan sistem berbasis elektronik ini, diharapkan pengelolaan logistik Alkon menjadi lebih efektif serta mampu mendukung program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Jembrana. Melalui SIMOLEK, kita melangkah bersama menuju pelayanan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Jembrana.

b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- Operasional Koordinasi Pelayanan KB dan Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes. Rincian Kegiatan adalah kegiatan Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang teregistrasi pada Sistem Informasi manajemen BKKBN dalam pembinaan Pelayanan KB di Faskes.
- Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes pembinaan meliputi SDM di Faskes, Ketersediaan Alat Kontrasepsi, Pemenuhan sarana Prasarana Pelayanan KB serta mekanisme pencatatan dan Pelaporan pada Aplikasi SIGA. Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 85,33% dari Pagu anggaran sebesar 22.695.000,- dan realisasi sebesar 19.364.911,-.

Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) telah melaksanakan Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2025 dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kegiatan ini diisi dengan berbagai rangkaian acara edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya perencanaan keluarga, penggunaan kontrasepsi yang tepat, serta upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan program Bangga Kencana.



Puncak acara juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba Role Model TPMB Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 Bidan Ni Putu Erlin Puspawati, S.Tr.Keb oleh Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Bali. Proses penilaian dilakukan oleh tim dari Provinsi Bali, mencakup:

- Pemeriksaan administrasi dan kelengkapan perizinan
- Peninjauan sarana dan prasarana pelayanan
- Observasi kualitas pelayanan kebidanan
- Penilaian inovasi dan keterlibatan dalam kegiatan Masyarakat
- Evaluasi upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Mengingat Pentingnya pemenuhan segala aspek dalam Pelayanan KB di Tempat Praktek Mandiri Bidan maka perlu untuk memenuhi semua aspek aspek yang sudah ditetapkan secara terstandar dan optimalisasi Pelayanan Keluarga Berencana di TPMB sehingga melalui upaya Lomba pemilihan Role Model Tempat Praktek Mandiri Bidan ini nantinya akan dapat dijadikan percontohan Tempat Praktek Mandiri Bidan yang mampu memberikan Pelayanan KB secara Paripurna serta selanjutnya dapat mendukung penguatan Pelayanan KB serta memberikan motivasi bagi sesama TPMB yang lain di Kabupaten Jembrana

KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PENANGGARAN KELUARGA/BKKBN

**DALAM RANGKA WORLD CONTRACEPTION DAY (WCD)**

**AYO IKUT KB GRATIS!!**

**MANFAAT PROGRAM KB:**

- Kesehatan Ibu & Anak Terjaga
- Ekonomi Keluarga Lebih Stabil
- Pendidikan Anak Lebih Terjamin
- Waktu untuk Diri & Karier
- Mencegah Stunting

**Kamis, 25 September 2025**

**09.00 Wita-Selesai**

**Puskesmas II Negara**

**Syarat: Membawa Identitas Diri**

**METODE KB YANG TERSEDIA**

IUD (Spiral)      Implant

**Free!!! Merchandise Menarik**

**#BERENCANAITUKEREN**



c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Rincian Kegiatan Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD, Implant, MOW, MOP dan Cabut Implant adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan IUD, Implant, MOW, MOP dan Cabut Implant oleh dokter/bidan kompeten. Sasaran Kegiatan adalah Pasangan usia subur yang akan dilayani. Lingkup Pembiayaan dari Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP:

- Biaya Jasa Medis IUD, Implant dan Cabut Implant sebesar : 105.000,- diberikan kepada Bidan pelaksana Pelayanan
- Biaya Jasa Medis MOW sebesar : 3.190.000,- diberikan kepada Dokter Pelaksana Pelayanan.
- Transport sebesar Rp. 50.000,- diberikan kepada Petugas Tenaga Lini Lapangan yang melakukan Penggerakan Pelayanan KB dan Akseptor yang dilayani pada kegiatan Momentum.
- Biaya Hidup bagi Akseptor MOW sebesar 450.000 diberikan kepada Akseptor yang dilayani MOW

Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 85,33% dari Pagu anggaran sebesar 22.695.000,- dan realisasi sebesar 19.364.911,-.

Pelayanan KB TKBK di Puskesmas I & II se-Kabupaten Jembrana. Dalam rangka mengoptimalkan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) Kabupaten Jembrana melaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Puskesmas I & II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Melalui pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan KB, memahami pentingnya perencanaan keluarga, serta turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana di Kabupaten Jembrana.



Dalam Rangka untuk meningkatkan capaian KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang di Kabupaten Jembrana dibutuhkan strategi pelaksanaan pelayanan KB dalam bentuk Bakti Sosial, berkenaan dengan hal tersebut dalam rangkaian memperingati HUT RSU Negara yang jatuh di bulan Desember 2025 Dinas PPPA PPKB Kab. Jembrana melaksanakan Kerjasama dalam bentuk kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB MOW di RSU Negara yang di laksanakan pada tanggal 4, 6, 10, dan 17 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Pelayanan MOW diberikan sebagai salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang efektif, khususnya bagi akseptor yang telah memenuhi kriteria medis dan membutuhkan perencanaan keluarga yang lebih permanen. Melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat :

- Meningkatkan cakupan pelayanan KB di Kabupaten Jembrana.
- Mendorong tercapainya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.



- Memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.



4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Adapun prioritas kegiatan Adalah Pembekalan Kampung KB, Pertemuan POKJA Kampung KB dan Penguatan Kampung KB. Adapun sasaran Kampung KB ada 15 Desa/Kel. Dengan output kegiatan adalah Pokja yang terlatih, RKM, Laporan dalam website Kampung KB, Laporan Tiap Bulan ke <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> dan Laporan tahunan penyelenggaraan Kampung KB. Serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah 99,67% dari Pagu anggaran sebesar 84.000.000,- dan realisasi sebesar 83.724.790,-



DINAS PPPA-PPKB KAB.JEMBRANA

DINAS PPPA-PPKB KAB.JEMBRANA

**Tabel 4.2.1**  
**Data Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	IUD	9,592	10,515	3,294	3,549	3,775	3,937
2	MOW	1,440	1,651	1,289	1,393	1.396	1,581
3	MOP	315	289	90	55	44	35
4	KONDOM	1,470	1,534	359	545	1.150	1,259
5	IMPLANT	5,046	5,893	3,210	3,768	4.377	4,483
6	SUNTIKAN	25,083	28,787	18,838	30,520	31.257	26,851
7	PIL	3,542	5,114	2,102	1,927	1.822	1,521
<b>JUMLAH</b>		<b>46,488</b>	<b>53,783</b>	<b>29,182</b>	<b>41,757</b>	<b>43,821</b>	<b>39,667</b>

**Tabel 4.2.2****FASKES KB DAN JEJARING FASKES KB TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	FASKES KB PEMERINTAH	FASKES KB SWASTA	PRAKTEK DOKTER	PMB SETARA FASKES	JARINGAN/JEJARING FASKES KB
1	MELAYA	2	0	0	5	1
2	NEGARA	3	2	2	13	10
3	JEMBRANA	3	5	3	7	12
4	MENDOYO	2	2	2	9	5
5	PEKUTATAN	2	1	1	0	3
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>31</b>

**Tabel 4.2.3****DATA PKKBD, SUB PKKBD DAN KELOMPOK KB TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	PPKBD	SUB PKKBD	KELOMPOK KB	KELOMPOK KB PRIA
1	MELAYA	10	61	60	-
2	NEGARA	12	54	54	-
3	JEMBRANA	10	48	48	-
4	MENDOYO	11	69	69	-
5	PEKUTATAN	8	30	30	-
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>262</b>	<b>261</b>	-

**Tabel 4.2.4**  
**DATA BALAI PENYULUHAN**

NO	KECAMATAN	BALAI PENYULUHAN
1	MELAYA	1
2	NEGARA	1
3	JEMBRANA	1
4	MENDOYO	1
5	PEKUTATAN	1
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>



**TABEL 4.2.5**  
**DATA KAMPUNG KB 2025**

NO	KECAMATAN	JML DESA	JUMLAH KAMPUNG KB	KLASIFIKASI KAMPUNG KB			
				DASAR	BER KEMBANG	BER KELANJUTAN	MANDIRI
1	MELAYA	10	10	4	1	3	2
2	NEGARA	12	12	6	1	4	1
3	JEMBRANA	10	10	0	0	10	0
4	MENDOYO	11	11	1	0	7	3
5	PEKUTATAN	8	8	4	0	3	1
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>7</b>

**TABEL 4.2.6**  
**DATA LOKASI FASKES KB YANG ADA DI KABUPATEN JEMBRANA**

No	Kecamatan	Nama Faskes KB	Alamat	Jenis Faskes KB
1	2	3	4	5
1.	Melaya	Puskesmas II Melaya Puskesmas I Melaya PMB Ni Ketut Widiartini PMB Siti Hasanah PMB Rosalia Nyoman PMB Azizah Yuhani PMB Ni Luh Budiawati PMB Yeni Kodi Nanga PMB Ni Wayan Bandawati	Gilimanuk Melaya Nusasari Tukadaya Ekasari Melaya Tukadaya Candikusuma Warnasari	Faskes Faskes Jejaring Jejaring Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes
2.	Negara	RSU Negara Puskesmas I Negara Puskesmas II Negara dr. Ketut Naba PMB Elida Fathia PMB Sumarlik dr. Dwipayana PMB Ni Luh Ketut Bodi Adnyani dr. I Ketut Darmawan PMB I Gst Ngurah Dwi Irawati PMB Ni Wayan Sarni PMB Ni Made Asmariyani dr. Farid Azmy PMB Lina Awalia PMB Ni Nyoman Budiasih PMB Ni Putu Ekawati PMB Nafisa Layali PMB Ni Nengah Sri Mastuti PMB Widjajati PMB Sawitri Aryani PMB Ni Ketut Budi Sasrini PMB Ni Nyoman Tikawati PMB Ni Made Dwi Antarini	Baler Bale Agung Kaliakah Pengambangan Baler Bale Agung Loloan Barat Baler Bale Agung Lelateng Lelateng  Banjar Tengah Banjar Tengah  Tegal Badeng Barat Pengambangan Cupel Pengambangan Baluk Baluk Banyubiru Banyubiru  Kaliakah Berangbang Pengambangan Lelateng Baler Bale Agung	Faskes Faskes Faskes Faskes Jejaring Jejaring Faskes Jejaring  Faskes Jejaring  Jejaring Jejaring Faskes Jejaring Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes  Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes Setara Faskes

		PMB Dinni Rohmaliya Putri	Cupel	Setara Faskes
		PMB Irma Krisnayanti	Banjar Tengah	Setara Faskes
		PMB Hendriyani	Lelateng	Setara Faskes
		PMB Suasni	Banyubiru	Setara Faskes
3.	Jembarana	Puskesmas I Jembrana	Dangintukadaya	Faskes
		Pustu Loloan Timur	Loloan Timur	Jejaring
		Pustu Pendem	Pendem	Jejaring
		Pustu Batuagung	Batuagung	Jejaring
		Pustu Dauhwaru	Dauhwaru	Jejaring
		Pustu Dangintukad	Dangintukadaya	Jejaring
		Puskesmas II Jembrana	Yeh Kuning	Faskes
		Pustu Perancak	Perancak	Jejaring
		Pustu Air Kuning	Air Kuning	Jejaring
		Poskesdes Budeng	Budeng	Jejaring
		Pustu Sangkaragung	Sangkaragung	Jejaring
		RSU Balimed	Dangintukadaya	Faskes
		RSU Bunda	Pendem	Faskes
		Klinik Pratama Polres	Pendem	Faskes
		dr. I Made Utama	Loloan Timur	Faskes
		PMB Anisa Surya	Loloan Barat	Jejaring
		PMB Ni Made Sulianti	Yehkuning	Jejaring
		dr. I Gst Ngr Wikanadi	Dauhwaru	Faskes
		PMB Nur Happy Yuliana	Loloan Barat	Jejaring
		dr. Mustika Kurniawati	Dauhwaru	Faskes
		PMB Wifka Yuliana	Yeh Kuning	Jejaring
		PMB Ni Luh Ayu Km	Pendem	Setara Faskes
		Ratna Diani		
		PMB Ni Luh Gd	Batuagung	Setara Faskes
		Wiratningsih		
		PMB Ni Ketut Soni	Dauhwaru	Setara Faskes
		PMB Sri Mardianah	Air Kuning	Setara Faskes
		PMB Budiani	Dauhwaru	Setara Faskes
		dr. I Gusti Putu Kusuma Wardana	Dauhwaru	Faskes
		PMB Ni Made Bakti	Perancak	Jejaring

		PMB Ni Ketut Tini Ernawati	Dauhwaru	Setara Faskes
		PMB Ni Luh Juniati	Batu Agung	Setara Faskes
4.	Mendoyo	Puskesmas II Mendoyo	Yehembang	Faskes
		Puskesmas I Mendoyo	Pergung	Faskes
		dr. I Nyoman Susila	Pohsanten	Faskes
		PMB Ni Wayan Kusmiati	Tegalcangkring	Jejaring
		Ni Putu Asrini	Mdy Dangin Tukad	Jejaring
		PMB Ni Ketut Andiyani	Yehembang	Setara Faskes
		dr. I Made Wedantara	Tegalcangkring	Faskes
		PMB Ni Luh Putu Sukasih	Yehembang	Jejaring
		PMB Ni Luh Muliastri	Pohsanten	Jejaring
		PMB Gst Ayu Km Sutiastari	Delodberawah	Jejaring
		dr. I Made Aditya Dian Nugraha	Yehembang	Faskes
		PMB Ni Putu Erlin Puspawati	Yehembang Kauh	Jejaring
		PMB Ni Komang Ayu Yuliari	Mendoyo Dauh Tukad	Jejaring
		PMB Ni Putu Sukanadi	Penyaringan	Setara Faskes
		PMB Ni Komang Parwati	Yehembang	Setara Faskes
		PMB Ni Ketut Serniasih	Penyaringan	Setara Faskes
		PMB Ni Luh Pt. Tiara Vrillia	Yehembang Kauh	Setara Faskes
		PMB Ni Made Ayu Wulandari, A.Md.Keb	Penyaringan	Setara Faskes
		PMB Ni Putu Shanty Martiawati	Pohsanten	Setara Faskes
5.	Pekutatan	Puskesmas I Pekutatan	Pekutatan	Faskes
		Puskesmas II Pekutatan	Gumbrih	Faskes
		PMB Ni Kadek Eni Sutantari	Pengeragoan	Jejaring
		PMB GAP Aryani	Pangyangan	Jejaring
		PMB Ni Kadek Wina Rini	Pengeragoan	Jejaring
		dr. I Wayan Sujana, M.Kes	Pekutatan	Faskes
		PMB Unik Es Purwanti	Pulukan	Jejaring

**4.3 BIDANG KETAHANAN, KUALITAS KELUARGA, DAN PENGEDALIAN PENDUDUK**  
**Capaian Kinerja Bidang Ketahanan, Kualitas Keluarga dan Pengendalian**  
**Penduduk tahun 2025**

Adapun program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Program Kerja Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Ketahanan Kualitas**  
**Keluarga dan Pengendalian Penduduk Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>PAGU SETELAH PERUBAHAN</b>
I	<p><b>Program</b> : Pengendalian Penduduk</p> <p><b>1. Kegiatan</b> : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</li> <li>- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</li> </ul>	<p><b>242.414.000</b></p> <p>242.414.000</p> <p>60.000.000</p> <p>101.400.000</p> <p>81.014.000</p>	<p><b>242.414.000</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II	<p><b>Program</b> : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p><b>2. Kegiatan</b> : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi dan Sosialisasi</li> </ul>	<p><b>1.948.000.000</b></p> <p>331.000.000</p> <p>153.000.000</p>	<p><b>1.984.000.000</b></p> <p>367.000.000</p> <p>189.000.000</p>



	<p>Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutsiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurga (UPPKA)</li> <li>- Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</li> </ul>	<p>130.000.000</p> <p>48.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>
	<p><b>3. Kegiatan :</b> Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>1.617.000.000</p>	<p>1.617.000.000</p>
	<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Data dan Informasi keluarga Berisiko Stunting termasuk remaja calon pengantin /Calon PUS ,Ibu hamil pasca salin/kelahiran ,baduta /balita</li> <li>- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting termasuk remaja calon pengantin /Calon PUS,Ibu hamil ,pasca salin/kelahiran ,baduta/balita</li> </ul>	<p>735.000.000</p> <p>882.000.000</p>	<p>735.000.000</p> <p>882.000.000</p>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.190.414.00</b>	<b>2.226.414.000</b>

### 1.1.1. Sumber Daya Manusia

Adapun keadaan SDM yang ada di Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**SDM di Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk**

No	Uraian	Pendidikan	Ket.
1	Kabid Ketahanan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk	Sarjana Kesehatan Masyarakat	PNS
2	Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda	Sarjana Hukum	PNS
3	Pengadministrasi Perkantoran	Sarjana Keperawatan	PNS
4	Pengolah Data dan Informasi	Sarjana Ilmu Pemerintahan	PNS
5	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PPPK
6	Penata Layanan Operasional	Sarjana Ekonomi	PPPK
7	Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK

### 1.1.2. Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL)

#### 2.4.1. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah program dari Kemendukbangwa/BKKBN untuk membina orang tua agar mampu mengasuh dan mendidik anak usia 0 – 5 tahun secara optimal, mencakup stimulasi fisik, mental dan sosial melalui kegiatan rutin bulanan oleh kader terlatih di tingkat masyarakat, guna meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita dan mempersiapkan mereka untuk sekolah.

Adapun data kelompok BKB di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Data Kelompok Bina Keluarga Balita di Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2021-2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	65	65	63	63	63
2	NEGARA	51	51	51	50	50
3	JEMBRANA	49	48	49	49	49
4	MENDOYO	64	64	64	64	67
5	PEKUTATAN	38	38	37	37	38
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>266</b>	<b>264</b>	<b>263</b>	<b>267</b>

#### 2.4.2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program strategis Kemendukbangga/BKKBN untuk membentuk ketahanan remaja melalui pembinaan keluarga dengan sasaran keluarga memiliki remaja usia 10 – 24 tahun yang bertujuan membekali orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan remaja agar terhindar dari masalah seperti Triad KRR (seks bebas, napza, HIV/AIDS) dan mewujudkan “Tegar Remaja” (Remaja Tangguh) melalui komunikasi efektif, kesehatan reproduksi dan kesiapan berkeluarga.

Adapun data kelompok BKR di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Data Kelompok Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2021-2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	4	5	4	4	5
2	NEGARA	4	6	7	8	10
3	JEMBRANA	3	10	10	10	10
4	MENDOYO	1	5	1	4	11
5	PEKUTATAN	8	8	8	8	8
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>44</b>

### 2.4.3. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah program dari Kemendukbangga/BKKBN yang merupakan sebuah wadah kelompok kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pemberdayaan keluarga agar lansia tetap sehat, aktif, mandiri dan produktif dengan fokus pada 7 Dimensi Lansia Tangguh (spiritual, sosial, emosional, fisik, intelektual, professional vokasional dan lingkungan) melalui penyuluhan, temu keluarga dan kunjungan rumah.

Adapun data kelompok BKL di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Data Kelompok Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2021-2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	11	11	12	12	12
2	NEGARA	13	13	14	13	15
3	JEMBRANA	15	15	15	15	15
4	MENDOYO	13	14	17	17	17
5	PEKUTATAN	8	8	8	8	8
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>67</b>

### 1.2.5. Kelompok Kegiatan UPPKA, PIK-R, PPKS dan Genre

#### 2.5.1. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah program pemberdayaan ekonomi dari BKKBN yang membentuk kelompok usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga akseptor KB melalui kegiatan ekonomi produktif, mengelola keuangan dan menabung, sejalan dengan program Bangga kencana.

Adapun data kelompok UPPKA di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Data Kelompok UPPKA di Kabupaten Jembrana**  
**Tahun 2021-2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	41	41	41	41	41
2	NEGARA	33	33	13	11	11
3	JEMBRANA	30	30	31	31	31
4	MENDOYO	23	21	22	22	22
5	PEKUTATAN	18	18	8	8	8
<b>TOTAL</b>		<b>145</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>115</b>	<b>113</b>

**2.5.2. Kelompok Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)**

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah sebuah wadah yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja yang bertujuan memberikan informasi, edukasi serta konseling seputar kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga dan masalah remaja lainnya seperti seks bebas, pernikahan dini dan HIV/AIDS melalui pendekatan sebaya untuk membantu remaja mencapai hidup sehat dan merencanakan masa depan.

Adapun data kelompok PIK Remaja di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Data Kelompok PIK Remaja**  
**di Kabupaten Jembrana Tahun 2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	10	10	9	9	9
2	NEGARA	6	7	9	8	8
3	JEMBRANA	11	8	10	10	10
4	MENDOYO	7	7	7	7	7
5	PEKUTATAN	3	3	5	5	5
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

### 2.5.3 Kelompok Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah sebuah wadah terpadu yang dibentuk Kemendukbangga/BKKBN untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsultasi, konseling serta rujukan terkait masalah kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga untuk seluruh siklus kehidupan, dari remaja hingga lansia.

Adapun data kelompok kegiatan PPKS di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Data Kelompok PPKS**  
**di Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2025**

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	MELAYA	1	1	1	1	1
2	NEGARA	1	1	1	1	1
3	JEMBRANA	1	1	1	1	1
4	MENDOYO	1	1	1	1	1
5	PEKUTATAN	1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### 2.5.4 Kelompok Kegiatan Generasi Berencana (Genre)

Generasi Berencana (Genre) adalah program Kemendukbangga/BKKBN untuk membekali remaja dan pemuda agar merencanakan kehidupan berkeluarga dengan bijak, mencakup pendidikan, karier dan pernikahan dengan pemahaman kesehatan reproduksi serta menjauhi perilaku berisiko seperti pernikahan dini, seks pranikah dan NAPZA. Tujuannya menciptakan remaja tangguh yang sehat fisik, mental, emosional dan berkontribusi positif bagi bangsa. Adapun tujuan dari program Genre adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pengetahuan

Memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan ~~pendewasaan usia perkawinan~~

- Membangun Karakter Bangsa  
Mendorong remaja menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan penyalahgunaan NAPZA
- Perencanaan Hidup Matang  
Mempersiapkan remaja untuk pendidikan karier dan pernikahan yang terencana

## **HASIL KEGIATAN**

### **2.1. Pengolah Data dan Informasi**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengolah Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan kunjungan ke sasaran GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)

GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) adalah program inovasi dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang mengajak masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menjadi "orang tua asuh" untuk membantu keluarga berisiko stunting dengan memberikan bantuan nutrisi, sanitasi, edukasi, dan pendampingan demi mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting, terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan Sasaran Utama:

- Ibu hamil.
- Ibu menyusui.
- Anak usia 0 – 23 bulan (Baduta) dari keluarga kurang mampu atau berisiko stunting.

Adapun bentuk bantuan GENTING yaitu berupa:

- **Nutrisi:** Makanan bergizi, suplemen untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- **Non-Nutrisi:** Perbaikan jamban sehat, dapur bersih, akses air bersih, dan perbaikan rumah layak huni.



- **Edukasi:** Pengetahuan pola asuh, gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan kebersihan.

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan Genting di Kecamatan Jembrana



## 2. Pelaksanaan Kegiatan SELANTANG (Sekolah Lansia)

Sekolah Lansia adalah program pendidikan non formal dari Kemendukbangga/BKKBN untuk lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif dan bahagia melalui pembelajaran tentang kesehatan, keagamaan, sosial dan keterampilan yang merupakan bagian dari program 5 menu SIDAYA untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara utuh melalui 3 standar kurikulum. Dan Sasaran pada sekolah lansia ini adalah lansia (60 tahun keatas).

## **Data Sekolah Lansia di Kabupaten Jembrana**

No	Kecamatan	Nama Sekolah Lansia
1	Melaya	Sekola Lansia Tunas harapan
2	Jembrana	Sekolah Lansia Mekar Sari
3	Mendoyo	Sekolah Lansia Werdi Widia Semaya
4	Negara	Sekolah Lansia Werda Karya Winangun
5	Pekutatan	Sekolah Lansia Purna Werda

### Tujuan Sekolah Lansia

- Kualitas Poktan BKL
- Pengetahuan lansia tentang menua & sakit
- Pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang kehidupan social dan ekonomi
- Pemahaman lansia Smart
- Pengetahaun, keterampilan dan perilaku lansia tentang kesehatan fisik & mental
- Pengetahuan, keterampilan dan perilaku lansia tentang lingkungan yang mendukung lansia

Berikut Dokumentasi Pelaksanaan Sekolah Lansia di masing-masing kecamatan.

#### 1. Sekolah Lansia Werda Karya Winangun, Kecamatan Negara





## 2. Sekolah Lansia Tunas Harapan, Kecamatan Melaya



## 3. Sekolah Lansia Werdi Widia Semaya, Kecamatan Mendoyo



## 4. Sekolah Lansia Mekar Sari, Kecamatan Jembrana



## 5. Sekolah Lansia Purna Werda, Kecamatan Pekutatan



### 3. Pelaksanaan Kegiatan TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak)

Taman Asuh Sayang Anak adalah program unggulan Kemendukbangga/BKKBN yang bertujuan menyediakan layanan penitipan dan pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun) berkualitas, terintegrasi dan komprehensif, mendukung ibu bekerja agar tetap produktif, sekaligus memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, berkarakter dan terlindungi melalui pendampingan pengasuh, pemantauan tumbuh kembang, edukasi orang tua dan rujukan layanan kesehatan/psikososial jika diperlukan.

Adapun manfaat dari Kegiatan TAMASYA ini adalah:

- a. Anak mendapatkan stimulasi sesuai usia
- b. Orang tua merasa tenang bekerja
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengasuhan anak
- d. Mendukung capaian indikator kabupaten layak anak
- e. Mencegah kekerasan, eksploitasi dan pengabaian terhadap anak

#### **Data Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kabupaten Jembrana**

No	Kecamatan	Alamat	Nama TPA
1	Jembrana	Kelurahan Pendem	Cemara Kasih
2	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	As-Shiddiqiyah



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi di TPA

1. As-Shiddiqiyah, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana



2. Cemara Kasih, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana



4. Pelaksanaan Kegiatan SATYAGATRA/PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)

SATYAGATRA adalah rebranding dari PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) yang diperkuat dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 15 Tahun 2023, merupakan wadah terpadu yang menyediakan layanan informasi, edukasi, konsultasi dan konseling untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga dari berbagai usia

(balita, remaja hingga lansia), membantu keluarga mengatasi masalah serta mendukung pembangunan keluarga berkualitas. Tujuannya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pendampingan dan dukungan yang mudah diakses masyarakat. Adapun layanan yang disediakan satyagatra meliputi :

1. Konseling : Pra nikah, BKB dan anak, remaja, keluarga
2. Informasi dan edukasi
3. Pembinaan
4. Rujukan

Pelaksanaan SATYAGATRA di balai penyuluh KB, berupa aksi nyata dan hasil cepat dalam pembinaan keluarga seperti:

1. Pendataan dan penilaian ketahanan keluarga menggunakan instrument satyagatra untuk menilai kondisi keluarga binaan
2. Kelas Bina Keluarga melalui BKB (Balita), BKR (Remaja), BKL (Lansia), UPPKA (Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor)
3. Edukasi dan Konseling Keluarga tentang gizi, pola asuh, Kesehatan, reproduksi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
4. Pemberdayaan Keluarga Berisiko Stunting bersinergi dengan TPK (tim pendamping keluarga) dan sektor lain (puskesmas, PKK dan Desa).

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan satyagatra di Balai Penyuluhan KB :

a. Kecamatan Jembrana



b. Kecamatan Melaya



c. Kecamatan Mendoyo





#### d. Kecamatan Negara



#### e. Kecamatan Pekutatan



### 5. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) merupakan program dari Kemendukbangga/BKKBN yang mendorong keterlibatan ayah untuk berperan aktif dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan membangun keluarga berkualitas, melawan fenomena fatherless dengan mengajak ayah menjadi teladan bukan hanya pencari nafkah, demi mewujudkan generasi tangguh dan keluarga harmonis.

GATI adalah gerakan transformative yang mengajak para ayah di Indonesia untuk lebih hadir dan terlibat dalam kehidupan anak-

anaknya, memberikan mereka dukungan emosional dan pendidikan karakter yang kuat untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

Di Kabupaten Jembrana telah terbentuk komunitas ayah teladan “BAHANA” (Bapak Hebat dan Teladan Jembrana) yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah yang merupakan pegawai dan suami pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam pengasuhan anak, remaja dan pra-remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat dan berkualitas.

Adapun tujuan utama GATI adalah:

- Meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sejak dini hingga remaja.
- Membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan berkualitas.
- Menjadi figur teladan yang memberikan contoh, dukungan emosional, dan bimbingan.
- Membantu pencegahan stunting dengan peran aktif ayah.

Aktivitas dan Implementasinya berupa Partisipasi Aktif dengan mengajak ayah untuk terlibat langsung seperti :

#### 1. Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA)



## 2. Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR)



Tujuan dari implementasi kegiatan SEBAYA dan GEMAR adalah untuk:

- Meningkatkan keterlibatan ayah dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- Memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak.
- Mengatasi fenomena *fatherless* (minimnya peran ayah) di Indonesia, yang dinilai berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, prestasi akademik, serta perilaku sosial dan emosionalnya.
- Memberikan dukungan positif terhadap lingkungan tumbuh kembang anak yang lebih sehat dan suportif.

### 2.2 Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan kunjungan ke sasaran GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
2. Pelaksanaan Kegiatan SELANTANG (Sekolah Lansia)
3. Pelaksanaan Kegiatan TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak)
4. Pelaksanaan Kegiatan SATYAGATRA/PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
5. Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)
6. ~~Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Poktan UPPKA Kuliner~~



Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan inisiatif strategis Kemendukbangga/BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi produktif untuk mendukung peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok UPPKA dan mensosialisasikan perencanaan keuangan keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas anggota kelompok serta membantu meningkatkan perekonomian keluarga bagi kelompok-kelompok UPPKA yang ada di Kabupaten Jembrana. Kegiatan pemantauan poktan UPPKA kuliner dilaksanakan di Kelompok UPPKA Pandan Harum, Dusun Tegal Asih, Desa Batuagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Pemantauan poktan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali bidang KSPK pada tanggal 11 November 2025



#### 7. Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Jembrana.

Generasi Berencana (GenRe) adalah program BKKBN yang bertujuan menyiapkan remaja dan pemuda agar merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang, dengan pemahaman kesehatan reproduksi, pendidikan, karier dan menjauhi perilaku berisiko seperti pernikahan dini, seks pra nikah dan NAPZA melalui wadah konseling remaja (PIK-R) untuk membentuk generasi

berkarakter, tangguh dan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan role model sebagai figure motivator dan promosi program GenRe di kalangan remaja agar lebih efektif. Figur motivator inilah yang akan menjadi Duta GenRe Kabupaten Jembrana.

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah se- Kabupaten Jembrana dengan batasan umur 16 tahun s/d 21 tahun. Sedangkan tujuan dari Genre yaitu meningkatkan pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, penghindaran perilaku berisiko, perencanaan hidup serta pembentukan karakter.

Untuk mengapresiasi keaktifan anggota PIK-R tersebut maka diadakan pemilihan Duta Genre setiap tahunnya. Di Tahun 2025 ini telah terpilih Duta Genre Kabupaten Jembrana, dengan hasil sebagai berikut :

🏆 Duta Genre Putra :

- Juara I : Ngurah Putu Adi Artha Wirawan
- Juara II : I Kadek Yogi Sevri Andita
- Juara III : Gian Eko Apui
- Juara Intelegensia : I Putu Wahyu Pradnyana

🏆 Duta Genre Putri :

- Juara I : Ni Luh Seri Andini
- Juara II : Ni Luh Intan Karunia Eka Putri
- Juara III : Ni Putu Marsela Yunita Dewi
- Juara Intelegensia : Ni Komang Twintita Sari Nurani

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Genre Kabupaten Jembrana



## 8. Sosialisasi Kelompok Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah wadah kegiatan yang dikelola oleh, untuk dan dari remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan konseling tentang Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, membantu remaja mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat dan menyiapkan remaja untuk memasuki masa transisi dengan perencanaan yang matang. PIK-R berfokus pada pemberdayaan remaja agar mampu merencanakan masa depan, memiliki keterampilan hidup (life skills) dan menghindari perilaku berisiko seperti narkoba, seks pranikah serta pernikahan dini atau Triad KRR.

### Manfaat PIK R bagi remaja

- Mendapatkan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup
- Membangun kemandirian dan kepercayaan diri



- Mempersiapkan diri untuk masa depan, termasuk pendidikan, karir, dan berkeluarga.

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelompok kegiatan PIK-R



### 2.3 Pengadministrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. SSK didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan, terintegrasi dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainnya. Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).

Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

Disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja. Juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan dengan adanya program SSK ini tentu saja selain memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Lebih dari itu mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan kelak ketika mereka menjadi dewasa.

Dalam konteks ini, siswa perlu diajak untuk bersikap: (1) Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi, (2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta (3) Saya Melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Saat ini di Jembrana ada 2 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yaitu :

1. SMA N 1 Negara.
2. SMA N 2 Negara
3. SMP N 1 NEGARA



#### b. Orientasi Rumah Dataku

Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenalkan pada masyarakat luas sebagai Rumah Dataku tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB yang dibentuk. Adapun manfaat yang dapat dilihat dengan adanya rumah dataku yaitu antara lain :

- Pertama, ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat menjadi salah satu prasyarat wajib pembentukan Kampung KB. Data kependudukan ini dapat bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil ataupun sumber data lain yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB

secara berkesinambungan. Pemenuhan akan kebutuhan data tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui Rumah Data Kependudukan.

- Kedua, Kampung KB yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, sangat membutuhkan data yang terkini, akurat dan terpercaya sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan sekaligus sebagai salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan program-program yang telah dicapai di Kampung KB.
- Ketiga, keberadaan Kampung KB yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, maupun meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, menjadikan kepemilikan data yang akurat dan terpercaya akan sangat bermanfaat.

Jadi bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah seperti adanya anak yang kurang gizi, teridentifikasi stunting, belum mempunyai akta kelahiran, banyaknya pengangguran, keluarga yang kurang mampu, keluarga yang rentan ketahanannya atau keluarga yang masih termasuk kategori PUS tetapi belum KB, tetapi juga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga pembangunan bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas. Rumah Data Kependudukan memang dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari



mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jumlah Rumah Dataku di Kabupaten Jembrana tahun 2025 terdapat 50 Rumah Dataku sesuai dengan table 9 di bawah ini.

Tabel 9  
Data Rumah Dataku di Kabupaten Jembrana Tahun 2025

NO	Kecamatan	Jumlah 2023	Jumlah 2024	Jumlah 2025
1	Melaya	2	8	8
2	Negara	3	8	10
3	Jembrana	4	10	10
4	Mendoyo	3	6	9
5	Pekutatan	3	4	4
	<b>Total</b>	15	36	41

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengembangan Rumah Dataku.





c. Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK 25)

Pendataan Keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. melalui kegiatan ini, didapatkan hasil Pendataan Keluarga yang dapat digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuan dari kegiatan Pemutakhiran data Keluarga adalah untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga menciptakan data yang interoperabilitas data. Program Pengendalian penduduk Kegiatan ini dilakukan oleh kader pendata dibawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Pemutakhiran data Keluarga (PK 25) dimulai pada tanggal 22 Juli s.d. 21 Agustus 2025 dimana pemutakhiran data ini terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu

2. Indikator Kependudukan
3. Indikator Pembangunan Keluarga
4. Indikator Keluarga Berencana

untuk mewujudkan terlaksananya Pendataan Keluarga yg optimal oleh Kader Pendata, dapat dicapai dengan dilakukan orientasi bagi kader pendata dan penunjukan Manajer Data, Manajer Pengelola dan Supervisor di Tingkat Kecamatan

sebagai TIM Pemantau dan Pengawas lapangan selama kegiatan PK-25.



**Data Keluarga Beresiko Stunting dari hasil Pemutakhiran PK-25 di Kabupaten Jembrana**

Tabel 10  
Data Keluarga Beresiko Stunting  
Tahun 2025

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah keluarga	Jumlah keluarga sasaran	Keluarga Berisiko Stunting	Keluarga Tidak Berisiko Stunting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
510101	Negara	32.308	20.048	2.107	17.941
510102	Mendoyo	22.773	10.920	1.462	9.458
510103	Pekutatan	9.796	4.936	761	4.175
510104	Melaya	19.931	11.494	1.364	10.130
510105	Jembrana	20.619	11.036	983	10.053
<b>Total</b>		<b>105.427</b>	<b>58.434</b>	<b>6.677</b>	<b>51.757</b>

Sumber: Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24)

Berdasarkan data tersebut didapatkan sebanyak 6.677 keluarga di Kabupaten Jembrana masuk kategori keluarga berisiko stunting atau sebesar 11,43 persen dari total keluarga sasaran, seperti pada Tabel 10. Tentunya angka tersebut patut mendapat perhatian semua pihak utamanya pemerintah daerah, karena dari angka keluarga berisiko stunting tersebut merupakan *predictor* atau faktor penyebab dari angka stunting

## 2.4 Capaian Kinerja Bidang Ketahanan, Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk tahun 2025

Tabel 11  
Capaian Kinerja Bidang Ketahanan, Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Tahun 2024			Tahun 2025		
				TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya partisipasi kelompok peduli KB	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk							
		1.1.	Cakupan kesertaan ber	94%	95,38%	101,47%	95%	88,98%	93,66%

			KB bagi Kelompok Tribina dan UPPKA						
		1.2.	Cakupan sekolah yang mempunyai PIK R	90%	97,44%	108,27%	90%	87,18%	96,86%
		1.3.	Rata-rata Jumlah Anak per keluarga	2	2,13	106,5%	2	2,15	107,5%

Dari Capaian Kinerja dapat dilihat:

1. Cakupan kesertaan ber KB bagi kelompok Tribina dan UPPKS.

Pada Tahun 2025 prosentase PUS di kelompok Tribina dan UPPKS yang menggunakan Kontrasepsi sebanyak 88,98% dari target 95 %. Dari data tersebut maka perlu ditingkatkan lagi adanya KIE dan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mewujudkan Keluarga Kecil bahagia Sejahtera.

2. Cakupan sekolah yang mempunyai PIK Remaja.

Sekolah yang telah mempunyai PIK Remaja 87,18% dari target 90 %. PIK Remaja dibentuk guna memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

3. Rata-rata Jumlah anak per keluarga.

Rata-rata Jumlah anak per keluarga yang ada di Kabupaten Jembrana Tahun 2025 sebanyak 2,15 dari target 2. Artinya dalam keluarga ada sebanyak 2 anak yang diasuh oleh keluarga tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025, merupakan gambaran umum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang berisi tentang informasi keberhasilan pembangunan dan pencapaian program / kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.

Dengan tersusunanya Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dimasa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi dinas / instansi lain yang berkepentingan.



Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Profil ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember

**Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 199010 2 001

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)  
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA KB BARU		JUMLAH PESERTA KB AKTIF	
		MKJP	NON MKJP	MKJP	NON MKJP
1	2014	1,781	3,145	17,267	32,080
2	2015	1,620	2,819	12,614	29,700
3	2016	1,519	2,710	13,991	29,634
4	2017	1,387	2,393	14,553	30,183
5	2018	1,416	1,927	15,246	30,459
6	2019	1,173	1,701	15,833	29,690
7	2020	1,465	1,949	16,393	30,095
8	2021	1,466	5,920	16,883	30,086
9	2022	866	573	7,883	21,299
10	2023	1,017	945	8,765	32,992
11	2024	1,201	1,621	9,592	34,229
12	2025	1,150	1,053	10,036	29,983

**JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR  
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	KECAMATAN	TAHUN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PEKUTATAN	5,510	5,562	5,506	4,374	11,691	4,740	4,720
2	MENDOYO	12,397	12,428	12,408	9,820	21,105	10,557	10,081
3	JEMBRANA	10,928	11,084	11,088	9,253	11,343	11,322	10,388
4	NEGARA	16,493	16,603	16,849	14,694	10,206	21,163	19,312
5	MELAYA	11,452	11,743	11,798	9,005	4,405	11,322	10.120
<b>TOTAL</b>		<b>56,780</b>	<b>57,420</b>	<b>57,649</b>	<b>47,146</b>	<b>58,750</b>	<b>59,671</b>	<b>54,621</b>

*Sumber Data Tahun 2025 : SIGA*

**JUMLAH PERKEMBANGAN PENGGUNA ALAT  
KONTRASEPSI  
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	IUD	9,592	10,515	3,294	3,549	3,775	3,937
2	MOW	1,440	1,651	1,289	1,393	1,396	1,581
3	MOP	315	289	90	55	44	35
4	KONDOM	1,470	1,534	359	545	1,150	1,259
5	IMPLANT	5046	5,893	3,210	3,768	4,377	4,483
6	SUNTIKAN	25083	28,787	18,838	30,520	31,257	26,851
7	PIL	3542	5,114	2,102	1,927	1,822	1,521
<b>JUMLAH</b>		<b>45,523</b>	<b>46,488</b>	<b>53,783</b>	<b>29,182</b>	<b>41,757</b>	<b>39,667</b>

**ELEMEN DATA**  
**KELUARGA BERENCANA, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

NO	ELEMEN DATA	SATUAN	DEFINISI /NILAI						KET
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kesehatan Masyarakat								
2	1. Jumlah Peserta Program KB Aktif	Jiwa	46,488	46,969	29,182	41,757	43,821	39,667	
3	1). Laki-laki	Jiwa	1,785	289	449	600	1,194	1,294	
4	2). Perempuan	Jiwa	44,703	46,680	28,733	41,157	42,627	38,373	
5	2. Jumlah Akseptor KB Baru	Jiwa	2,683	7,386	1,439	1,962	2,822	2,203	
6	1). Laki-laki	Jiwa	82	621	71	259	242	176	
7	2). Perempuan	Jiwa	2,601	6,765	1,368	1,693	2,580	2,027	
8	3. Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasang	57,420	57,649	47,146	58,750	59,671	54,621	
9	4. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	Pasang	46,488	46,969	29,182	41,757	43,821	40,985	

**JUMLAH PEKERJA PEREMPUAN  
DI INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA  
KABUPATEN JEMBRANA**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>SWASTA</b>	<b>TOTAL</b>
1	<b>2014</b>	2,599	90,607	93,206
2	<b>2015</b>	1,898	61,397	63,295
3	<b>2016</b>	3,045	46,970	50,015
4	<b>2017</b>	3,045	61,264	64,309
5	<b>2018</b>	2,540	70,170	72,710
6	<b>2019</b>	3,091	70,250	73,341
7	<b>2020</b>	2,442	70,860	73,302
8	<b>2021</b>	2,896	30,558	33,454
9	<b>2022</b>	2,457	4,415	6,872
10	<b>2023</b>	2,654	47,796	50,450
11	<b>2024</b>	3,040	9,474	12,514
12	<b>2025</b>	4,037	9,329	13,366



NO	ELEMEN DATA		SATUAN	DEFINISI /NILAI						KET	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	1.	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	73,341		33,454	6,872	50,450	12,514	13,366	
2		1). Lembaga Pemerintah	Orang	3,091		2,896	2,457	2,654	3,040	4,037	Data dari BKPSDM dan Buku Agregat Dinas Dukcapil
3		1. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II	Orang	4		5	4	4	4	4	Data dari BKPSDM
4		2. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon III	Orang	16		18	20	23	22	22	Data dari BKPSDM
5		3. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IV	Orang	121		63	75	80	77	71	Data dari BKPSDM
6		2). Lembaga Swasta	Orang	70,109		30,558	4,415	47,796	9,474	9,329	Data dari Dinas PM PTSP TK
7		I. Perkara Hukum									
8	1.	Jumlah Perkara Terselamatkan :									
9		1). Perlindungan perempuan dan anak	Perkara	3		8	30	34	29	41	Data dari UPPA Polres Jembrana dan UPTD PPA
10	2.	Jumlah Perkara Tidak Terselamatkan :									
11		1). Perlindungan perempuan dan anak	Perkara	-		-	-	3	-	-	

## Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana

1. Piagam Penghargaan kepada Bapak Bupati Jembrana atas Prestasi dan Komitmen serta Peran Aktif dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting.



2. Piagam Penghargaan kepada Ibu Bupati Jembrana atas Prestasi dan Komitmen serta Peran Aktif dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting.





3. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Apresiasi Pemerintah Daerah yang memiliki regulasi terkait penyelenggaraan KKB



4. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Pemenang Apresiasi DAK Sub Bidang KB Bagi Pemerintah Kab/Kota Kategori Pagu Rendah



5. Piagam Penghargaan diberikan kepada Dinas PPPA-PPKB Kabupaten Jembrana sebagai Juara II Apresiasi Sistem Monitoring DAK Sub Bidang Keluarga Berencana (SIDAK KENCANA) Semester I Tahun 2024



6. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana atas Kontribusi dalam Peningkatan Kesertaan KB pada Kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bersama Mitra Kerja pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2021





7. Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori Nindya



8. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Mitra Kerja Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Terbanyak I Tingkat Provinsi Bali





9. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Apresiasi Pengelola Program Ketahanan Keluarga Terbaik III TK Provinsi Bali Tahun 2023



10. Piagam Penghargaan kepada diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Capaian KK Terdata Tercepat 100%



11. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Dengan Cakupan KK Termutakhirkan 100%

